

**PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2020**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Aisyah Nurul Qomariah Muharomi
Nomor Mahasiswa : 18313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

**PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2020**

SKRIPSI



Siap diujikan 7/3/22



Oleh :

Nama : Aisyah Nurul Qomariah Muharomi
Nomor Mahasiswa : 18313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

**PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2011-2020**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Aisyah Nurul Qomariah Muharomi
Nomor Mahasiswa : 18313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Maret 2022

Penulis,



Aisyah Nurul Qomariah Muharomi

PENGESAHAN

PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2020

Nama : Aisyah Nurul Qomariah Muharomi
Nomor Mahasiswa : 18313301
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 7 Maret 2022
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH UPAH MINIMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2020**

Disusun Oleh : **AISYAH NURUL QOMARIAH MUHAROMI**

Nomor Mahasiswa : **18313301**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 07 April 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Nur Feriyanto, Prof. Dr. Drs., M.Si.**



Penguji : **Prastowo, S.E., M.Ec.Dev.**



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

يُسْرًا أَلْهَبَ مَعَ فَإِنَّ , يُسْرًا أَلْهَبَ مَعَ إِنَّ

Artinya :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”

(HR Ibnu Hibban)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah: Beranjak Dewasa)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Alhamdulillahirabbil alamin, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Banyak pihak yang telah memberikan doa dan bantuan berupa dukungan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik.
3. Orang tua penulis Alm. Bapak Haryanto Masdwi Wibowo, Ayah Agung Nugroho, dan Ibu Tri Suyatmi yang telah membesarkan, mendoakan, dan mendukung pendidikan penulis hingga menjadi Sarjana Ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan berbagai dukungan sehingga putrinya dapat lulus tepat waktu. Adik-adik penulis Alm. Muhammad Hafidz Imammudin, Fakhri Mu’afi Habibi Hidyatullah, dan Santika Maharani yang sangat penulis sayangi dan membuat hari-hari penulis bahagia.
4. Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktunya dan pelajaran yang sangat berharga untuk saling menghargai dan menolong.
5. Seluruh dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang

bermanfaat dan seluruh staf yang sabar dalam melayani selama proses penelitian.

6. Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Galih Hermawan, Riri Bustadinda, Ratiarum Fatika Yoertiara, Egis Wulandari, Amalia Atih Kurlianingsih, Inggar Puspitasari, Nuril Ikhsani, dan Aisyah Umu Barui yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Terima kasih atas semua doa dan dukungan berupa bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Maret 2022



Aisyah Nurul Qomariah Muharomi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis mendapat bantuan berupa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing
5. Pak Prastowo, S.E., M.EC.Dev. selaku Dosen Penguji
6. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
7. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi agar berkembang ke arah yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak.

Yogyakarta, 7 Maret 2022



Aisyah Nurul Qomariah Muharomi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Kemiskinan.....	12
2.2.2 Upah Minimum	15
2.2.3 Jumlah Penduduk	17

2.2.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.3	Kerangka Pemikiran.....	19
2.4	Formulasi Hipotesis	19
2.5	Hipotesis Operasional.....	20
2.5.1	Uji Parsial.....	20
2.5.2	Uji Simultan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....		22
3.1	Jenis dan Sumber Data	22
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2.1	Variabel Terikat (Dependen)	22
3.2.2	Variabel Bebas (Independen).....	22
3.3	Metode Analisis.....	23
3.4	Pendekatan Model Regresi Data Panel.....	24
3.4.1	CEM (Common Effect Model).....	24
3.4.2	FEM (Fixed Effect Model)	24
3.4.3	REM (Random Effect Model).....	25
3.5	Pemilihan Model.....	25
3.5.1	Uji Chow.....	25
3.5.2	Uji LM.....	26
3.5.3	Uji Hausman	26
3.6	Uji Statistik.....	27
3.6.1	Uji Parsial (Uji t)	27
3.6.2	Uji Simultan (Uji F).....	28
3.6.3	Koefisien Determinasi (R^2)	29
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		29

4.1	Deskriptif Data	30
4.2	Hasil Analisis Penelitian.....	33
4.2.1	Hasil Regresi Data Panel	33
4.2.2	Pemilihan model yang tepat.....	34
4.2.3	Uji Statistik Model <i>Fixed Effect</i>	35
4.2.4	Pembahasan.....	37
4.2.4	Analisis Kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.....	38
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI		39
5.1	Simpulan	40
5.2	Implikasi.....	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN.....		43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Provinsi dengan Persentase Kemiskinan di atas Angka Kemiskinan Nasional.....	1
Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	30
Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel dengan CEM, FEM, dan REM.....	33
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Eviews 9	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Eviews 9	35
Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Wilayah Pulau Jawa 5 Tahun Terakhir	2
Gambar 1.2 Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	3
Gambar 1.3 Upah Minimum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	4
Gambar 1.4 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	5
Gambar 1.5 PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	6
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Penawaran.....	14
Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Permintaan	15
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 4.1 Intercept Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Jiwa)	44
Lampiran B Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Rupiah).....	45
Lampiran C Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Jiwa)	46
Lampiran D PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Juta Rupiah)	47
Lampiran E Penduduk Miskin, Upah Minimum, Jumlah Penduduk, PDRB Provinsi DIY Tahun 2011-2020	48
Lampiran F Hasil Uji Chow	49
Lampiran G Hasil Uji Hausman.....	50
Lampiran H Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect	51
Lampiran I Nilai Intercept Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.....	52

ABSTRAK

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu jumlah kemiskinan yang berkurang dari tahun ke tahun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk 12 provinsi miskin di Indonesia dan paling miskin di Pulau Jawa. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai persentase kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2020. Dalam pemilihan model regresi data panel, didapatkan model yang paling tepat untuk penelitian ini yaitu model *fixed effect*. Diperoleh nilai R^2 sebesar 0,991223 yang berarti bahwa 99,12% variabel kemiskinan dijelaskan oleh variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB. Variabel upah minimum dan jumlah penduduk secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: *kemiskinan, upah minimum, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu jumlah kemiskinan yang berkurang dari tahun ke tahun. Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonominya apabila banyak penduduknya yang hidup dengan sejahtera seperti tujuan bangsa Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pengentasan kemiskinan untuk tercapainya hidup yang lebih sejahtera merupakan kewajiban negara-negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia.

Penduduk miskin merupakan penduduk dengan keterbatasan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tingkat kemiskinan pada suatu negara tercermin dalam kesejahteraan penduduk di negara tersebut, apabila penduduk di negara tersebut semakin sejahtera maka kemiskinan pada negara tersebut cenderung rendah (Leasiwal, 2013). Rendahnya kemiskinan di suatu negara merupakan simbol kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, sebagian besar pemerintah di dunia berusaha mengentaskan jumlah penduduk yang miskin dengan tujuan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya bagi penduduk-penduduknya (Feriyanto dkk, 2020).

Di Indonesia, terdapat 34 provinsi dan beberapa dari provinsi tersebut mempunyai persentase kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional 9,41% pada tahun 2019 dan 10,07% pada tahun 2020 salah satunya yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan 12 di antara provinsi-provinsi miskin di Indonesia. Hal tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Provinsi dengan Persentase Kemiskinan di atas Angka Kemiskinan Nasional

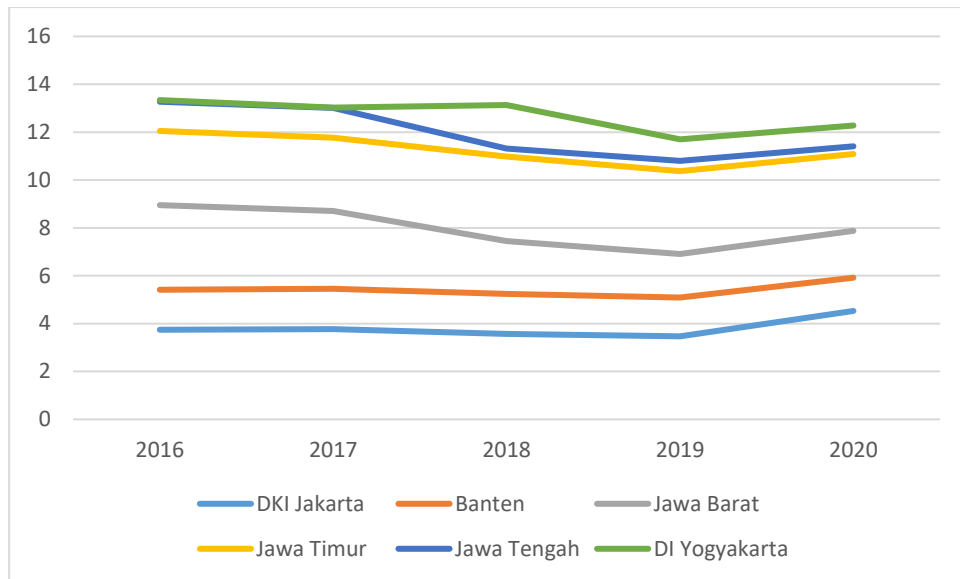
No.	Provinsi	Tingkat Kemiskinan
1	Papua	27,53
2	Papua Barat	22,17
3	Nusa Tenggara Timur	21,09
4	Maluku	17,69

5	Gorontalo	15,52
6	Aceh	15,32
7	Bengkulu	15,23
8	Nusa Tenggara Barat	14,56
9	Sulawesi Tengah	13,48
10	Sumatera Selatan	12,71
11	Lampung	12,62
12	DI Yogyakarta	11,70
13	Sulawesi Tenggara	11,24
14	Sulawesi Barat	11,02
15	Jawa Tengah	10,80
16	Jawa Timur	10,37
INDONESIA		9,41

Sumber: BPS, 2021

Pada tahun 2019, terdapat 16 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional. Tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Papua sebesar 27,53%, Papua Barat sebesar 22,17%, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 21,09%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan 12 di antara provinsi-provinsi miskin di Indonesia yaitu sebesar 11,70%. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi provinsi yang termiskin di wilayah Pulau Jawa selama 5 tahun berturut-turut.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Wilayah Pulau Jawa 5 Tahun Terakhir

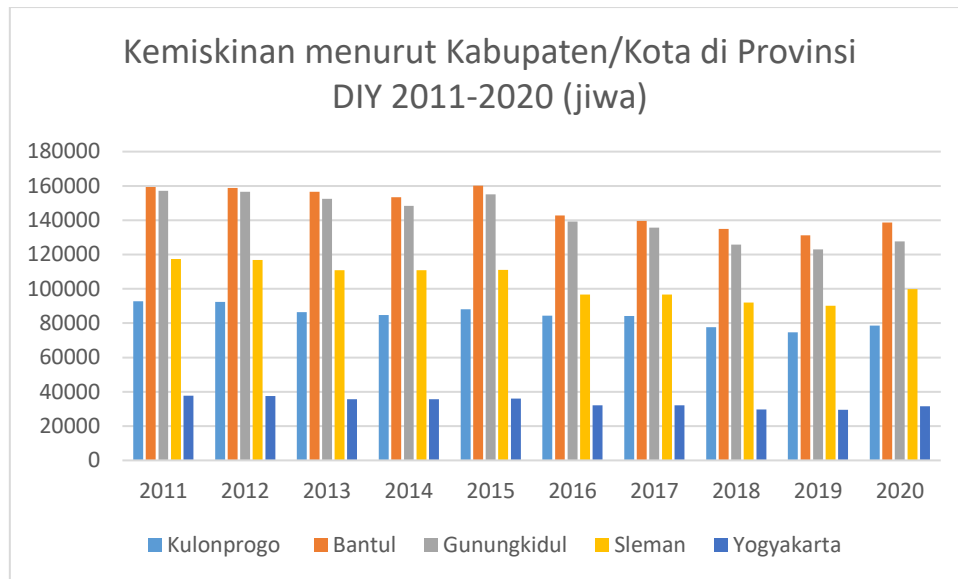


Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat tiga provinsi di wilayah Pulau Jawa dengan persentase kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan ekonomi di Indonesia sebagian besar berpusat di Pulau Jawa, namun kenyataannya 50% provinsi di Pulau Jawa mengalami kemiskinan. Dari enam provinsi yang ada di wilayah Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi provinsi paling miskin selama kurun waktu 2016-2020. Oleh karena itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap belum berhasil dalam pembangunan ekonominya terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi, hanya beberapa kabupaten saja yang mempunyai jumlah penduduk miskin rendah. Perbedaan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota tersebut dapat menjadi acuan seberapa besar masalah dan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk melakukan pengentasan kemiskinan.

Gambar 1.2 Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

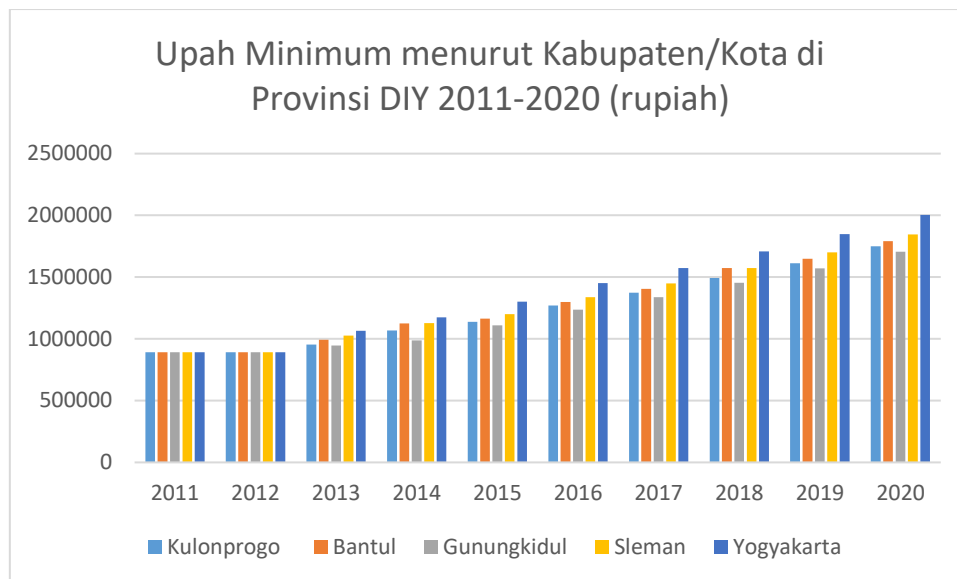


Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta paling rendah karena merupakan perkotaan sebagai pusat perekonomian dan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama 10 tahun berturut-turut, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk pengentasan kemiskinan ini.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah upah minimum. Pada tahun 2021, Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta menempati upah paling rendah se-Indonesia yaitu sebesar Rp 1.770.000,00. Beberapa orang menganggap bahwa upah tersebut sesuai dengan biaya hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang “serba murah”. Namun, tetap saja Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta masih jauh jika dibandingkan dengan UMP daerah lain. Upah yang terlalu rendah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masyarakat sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Gambar 1.3 Upah Minimum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

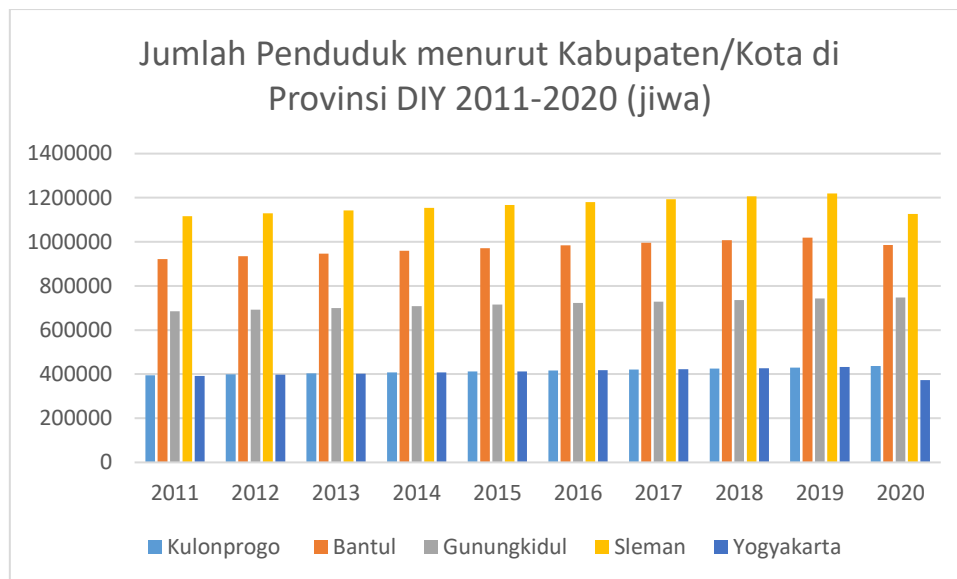


Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1.3, upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. Upah minimum tertinggi didominasi oleh Kota Yogyakarta, sedangkan upah minimum terendah berada pada Kabupaten Gunungkidul. Jumlah kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun diharapkan di atas kebutuhan hidup layak masyarakat karena kenaikan upah minimum tidak akan berarti apabila jumlahnya masih setara dengan jumlah kebutuhan untuk hidup layak bahkan di bawahnya.

Selain upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, kemiskinan juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh perbaikan kualitas penduduk menyebabkan kemiskinan semakin meningkat. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kenaikan jumlah tenaga kerja menjadi cepat, padahal kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang baru sangat terbatas (Arsyad, 2010).

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

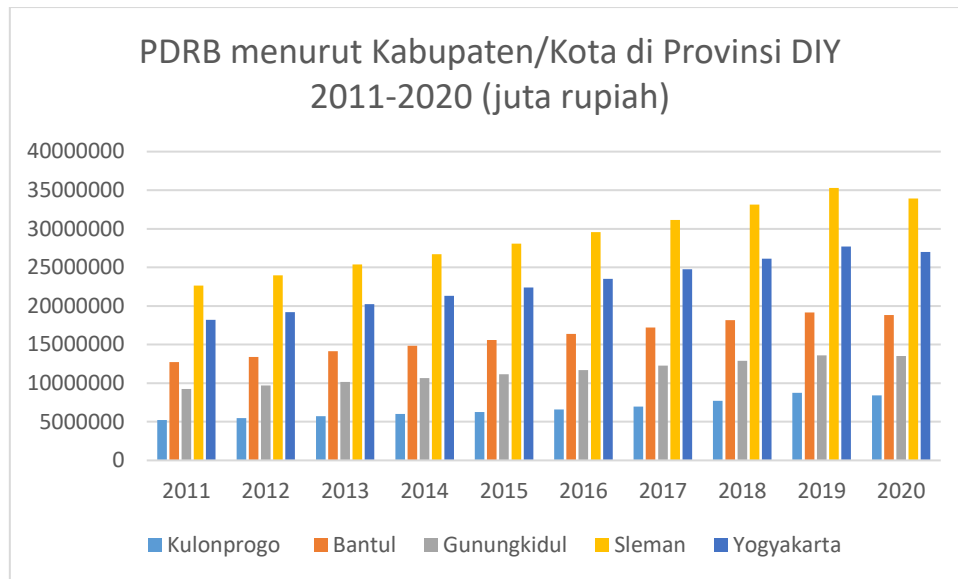


Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1.4, jumlah penduduk pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Sleman, sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk yang meningkat cenderung menyebabkan peningkatan kemiskinan, namun diharapkan peningkatan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih produktif dan dapat menurunkan kemiskinan.

Semua daerah menginginkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerahnya meningkat setiap tahun. PDRB yang tinggi menandakan keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan ekonomi. Hal itu dikarenakan PDRB yang tinggi menunjukkan produksi yang tinggi akibat banyaknya permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat bertambah karena pendapatan yang bertambah. Bertambahnya pendapatan masyarakat menunjukkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Namun, PDRB tidak akan berarti apabila tidak mampu mengurangi kemiskinan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata bahkan menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Gambar 1.5 PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY



Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Gambar 1.5, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB tertinggi didominasi oleh Kabupaten Sleman, sedangkan PDRB terendah berada pada Kabupaten Kulonprogo. PDRB yang mengalami kenaikan menandakan bahwa setiap kabupaten/kota berhasil dalam kinerjanya, namun perlu ditelaah lebih lanjut mengapa PDRB yang meningkat masih menyebabkan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat digunakan oleh pemerintah tiap kabupaten/kota sebagai dasar mengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upah minimum berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020?
2. Bagaimana jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020?

3. Bagaimana PDRB berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020?
4. Bagaimana upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Menganalisis bagaimana upah minimum berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
2. Menganalisis bagaimana jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
3. Menganalisis bagaimana PDRB berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
4. Menganalisis bagaimana upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.

Manfaat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Pemerintah

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan yang tepat terkait pengentasan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bappeda dan BPS

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Bappeda dan BPS untuk menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan ekonomi agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

3. Mahasiswa

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan skripsi sebagai bahan referensi penelitian terkait dengan

kemiskinan, terutama kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini, kajian pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu mengenai kemiskinan baik di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di daerah lain beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB. Pada landasan teori membahas mengenai teori tentang kemiskinan, upah minimum, jumlah penduduk, PDRB, serta keterkaitan antar variabel tersebut. Selain itu, pada bab ini juga dibahas tentang hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis dan sumber data sekunder, definisi variabel operasional, persamaan model penelitian, metode dan proses analisis berupa pemilihan model yang tepat dalam analisis regresi data panel serta analisis mengenai uji statistik yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi paparan pengolahan data penelitian, hasil analisis, serta pembahasannya untuk menguji hipotesis yang mengacu pada tujuan penelitian. Analisis tersebut berupa analisis statistik deskriptif, hasil pemilihan model dalam regresi data panel, koefisien determinasi, serta hubungan variabel independen dan dependen secara parsial dan simultan (bersama-sama).

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari bagian pembahasan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga membahas mengenai implikasi dari penelitian agar dapat membantu dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukannya penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan maupun perbandingan sehingga kelemahan atau kekurangan pada penelitian yang lalu dapat disempurnakan. Penelitian yang dilakukan saat ini dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya karena seiring bertambahnya waktu penelitian maka hasil penelitian juga dapat berubah. Oleh karena itu, penelitian yang sedang dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Acuan	Teknik Analisis dan Hasil Penelitian
1	<i>The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia</i> (Feriyanto dkk, 2020)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. dkk menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa PDRB riil berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2010-2019.
2	Efektivitas Relatif dari Upah Minimum dan Kredit Pajak Penghasilan yang diperoleh sebagai Anti Alat Kemiskinan (Quinn dan Cahill, 2017)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Quinn dan Cahill menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
3	Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014 (Kurniawati dkk, 2017)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dkk menggunakan analisis regresi data panel tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2006-2014.
4	Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum terhadap	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riva dkk menggunakan analisis regresi linier

	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau (Riva dkk, 2014)	berganda tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
5	Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Damanik dan Sidauruk, 2020)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rapika Kesatriani Damanik dan Seln Aprilia Sidauruk menggunakan analisis regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2017, sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan.
6	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sulawesi Tahun 2006-2015 (Zuharmin, 2017)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuharmin menggunakan analisis regresi data panel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi tahun 2006-2015.
7	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Saputra, 2011)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra menggunakan analisis regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
8	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Rusdarti and Sebayang, 2013)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang menggunakan analisis regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa

		PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
9	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia (Suliswanto, 2010)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suliswanto menggunakan analisis regresi data panel tersebut menunjukkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
10	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010 (Wiguna, 2013)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Indra Wiguna menggunakan analisis regresi data panel tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2010.

Berdasarkan kajian pustaka pada Tabel 2.1, persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu topik yang digunakan dalam penelitian ini tentang kemiskinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada wilayah yang diteliti berada pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu data pada tahun 2011-2020 dimana pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

4.2.2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat maka masyarakat dianggap semakin sejahtera. Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi standar hidup minimum. Standar hidup minimum tersebut seperti terbatas bahkan tidak mampu dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak, air bersih, gizi yang cukup, serta pendidikan dan akses kesehatan yang memadai.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yaitu adanya ketimpangan ekonomi antar daerah sehingga terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat. Terkadang masyarakat juga terjebak dalam kondisi sosial ekonomi yang dialaminya yaitu pada lingkungan kemiskinan sehingga belum ada bahkan tidak ada peluang untuk dapat keluar dari kondisi tersebut. Kemiskinan merupakan situasi dengan keterbatasan dan semua orang tentunya tidak ingin terjebak dalam kondisi kemiskinan (Supriatna, 2000).

4.2.2.2 Ukuran Kemiskinan

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2010), ukuran kemiskinan terbagi menjadi tiga pengertian yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural antara lain sebagai berikut :

1. Kemiskinan absolut

Salah satu golongan yang termasuk dalam kemiskinan absolut yaitu masyarakat dengan jumlah pendapatan di bawah garis kemiskinan. Pendapatan yang diperoleh masyarakat tersebut dianggap kurang cukup bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pendapatan yang diperoleh masyarakat golongan kemiskinan absolut ini sebagian besar digunakan untuk makan sehari-hari, bahkan ada yang mengalami kelaparan.

2. Kemiskinan relatif

Adanya ketimpangan ekonomi antar daerah salah satunya menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika pendapatan seseorang dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak namun pendapatan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di lingkungan sekitarnya maka orang tersebut tergolong dalam kemiskinan relatif.

3. Kemiskinan kultural

Seseorang atau kelompok masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan apabila orang tersebut terus berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Apabila orang tersebut tidak berusaha memperbaiki kehidupannya, malas, dan pasrah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya maka orang tersebut termasuk golongan orang yang mengalami kemiskinan kultural. Garis kemiskinan seseorang akan berubah apabila orang tersebut memperbaiki dan merubah hidupnya menjadi lebih baik.

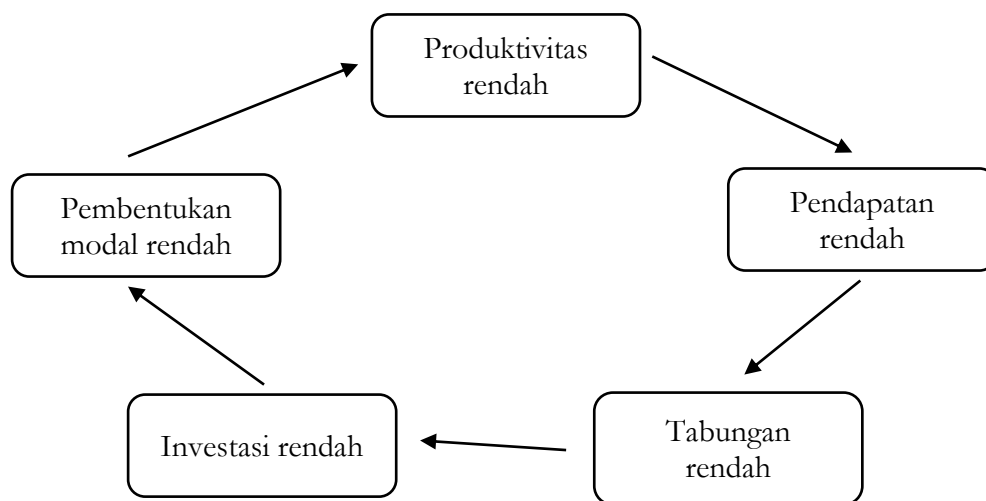
4.2.2.3 Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran setan kemiskinan merupakan beberapa hal yang saling terkait satu sama lain dan menyebabkan suatu negara akan tetap miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam mencapai pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sehingga terjebak dalam kondisi kemiskinan. Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah, namun sumber daya alam tersebut kurang dimanfaatkan dengan optimal karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terbatasnya jumlah tenaga ahli, serta mobilitas dari sumber daya tersebut masih terbatas sehingga tidak dapat berkembang.

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2006), terdapat dua sisi lingkaran setan kemiskinan yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan.

1. Sisi penawaran (*supply*)

Pada sisi penawaran, lingkaran setan kemiskinan ini berkaitan dengan penawaran lapangan kerja melalui tabungan masyarakat. Apabila masyarakat enggan menabung, maka seseorang tidak bisa mengembangkan usaha/bisnis yang dijalaninya bahkan berinvestasi. Oleh karena itu, usaha/bisnis yang *stuck* menyebabkan produktivitas dan pendapatan menjadi rendah kemudian tabungan rendah, dan seterusnya.

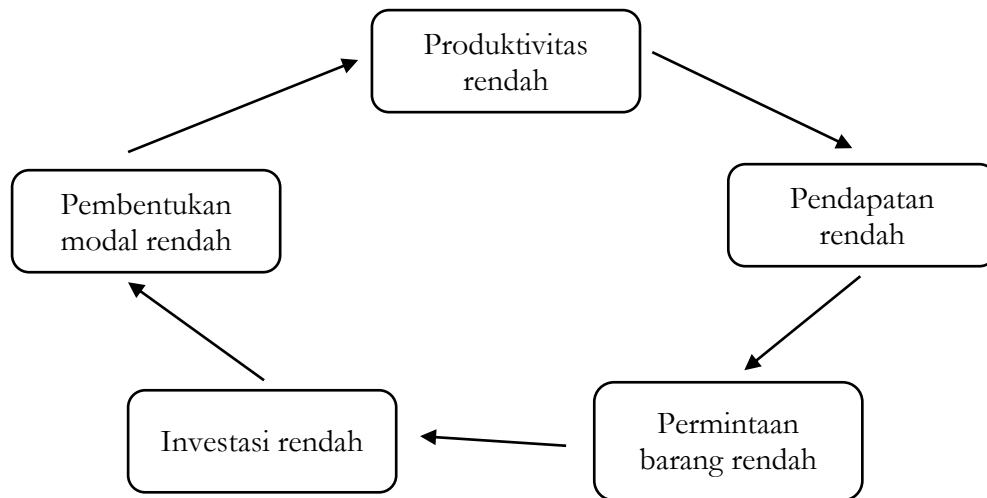


Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Penawaran

2. Sisi permintaan (*demand*)

Pada sisi permintaan, lingkaran setan kemiskinan ini berkaitan dengan permintaan akan barang/jasa. Apabila pendapatan masyarakat rendah maka daya beli masyarakat (permintaan) berkurang. Oleh karena itu, investor enggan untuk berinvestasi sehingga tidak

adanya pembentukan modal yang menyebabkan produktivitas perusahaan rendah serta pendapatan pegawai juga rendah, dan seterusnya.



Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Permintaan

2.2.2 Upah Minimum

2.2.2.1 Definisi Upah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah merupakan imbalan atas hasil kerja seseorang yang sebelumnya telah tercantum dalam suatu perjanjian kerja baik secara kesepakatan maupun perundang-undangan dan harus diberikan sesuai dengan hak-hak pekerja, upah tersebut biasanya dalam bentuk uang. Dalam bukunya, Sukirno (2005) membagi upah menjadi dua jenis yaitu upah nominal dan upah riil.

1. Upah nominal

Upah nominal merupakan upah yang diberikan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja kepada buruh sebagai pekerja atas jasa yang telah dilakukan baik tenaga dalam proses produksi barang maupun jasa lainnya, upah tersebut biasanya dalam bentuk uang.

2. Upah riil

Upah riil merupakan upah yang diperoleh pekerja dan upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik membeli barang maupun jasa.

2.2.2.2 Komponen Upah

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, upah dikelompokkan menjadi beberapa komponen yaitu upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, fasilitas, serta bonus.

1. Upah pokok

Upah pokok merupakan imbalan atas hasil kerja seseorang berdasarkan jenis maupun tingkat pekerjaan orang tersebut. Besaran upah pokok ini sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai kesepakatan maupun perundang-undangan.

2. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap merupakan tunjangan yang dibayarkan secara tetap baik kepada buruh sebagai pekerja maupun kepada keluarga buruh tersebut. Tunjangan tetap biasanya dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, maupun tunjangan anak.

3. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap merupakan kebalikan dari tunjangan tetap dimana tunjangan tidak tetap ini dibayarkan secara tidak tetap dan tidak dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

4. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini berupa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja kepada buruh sebagai pekerja atas dasar alasan-alasan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaannya seperti fasilitas rumah, mobil, dan lain sebagainya.

5. Bonus

Bonus biasanya diberikan perusahaan kepada pekerja apabila perusahaan tersebut mendapat laba (keuntungan) melebihi target yang diperkirakan. Selain itu, bonus tersebut terkadang diberikan kepada pekerja karena kerja kerasnya selama ini seperti peningkatan produksi melebihi target produksi biasanya.

2.2.2.3 Keterkaitan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Adanya penetapan upah minimum didasarkan atas kesejahteraan masyarakat agar tidak adanya ketimpangan pendapatan yang jauh antar anggota masyarakat. Jumlah upah minimum yang jauh dengan daerah lain seringkali menyebabkan konflik mengingat akhir-akhir ini harga kebutuhan dasar hampir sama dengan daerah dengan upah minimum yang tinggi. Oleh karena itu, upah minimum regional yang meningkat setiap tahun diharapkan mampu menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga kesejahteraan dan kehidupan yang layak dapat dicapai.

Upah minimum diharapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sehingga apabila upah minimum kabupaten/kota mengalami kenaikan maka kemiskinan baik tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Apabila upah

minimum meningkat, pendapatan pekerja akan meningkat pula sehingga pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memperoleh hidup yang lebih layak sehingga mengurangi kemiskinan.

2.2.3 Jumlah Penduduk

Menurut Said (2001), penduduk adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang terlalu besar dianggap sebagai beban bagi pembangunan negara. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat menandakan pertambahan jumlah tenaga kerja pula, namun kemampuan negara untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat terbatas sehingga tidak bisa sepenuhnya menampung tenaga kerja tersebut.

Semakin besarnya jumlah penduduk dalam suatu negara ataupun daerah akan memberikan potensi yang besar bagi pertumbuhan pasar karena banyaknya permintaan akan suatu barang konsumsi yang perlu disediakan. Di samping itu, jumlah penduduk yang semakin besar menandakan semakin banyak pula fasilitas umum yang perlu dibangun. Jumlah penduduk yang tinggi akan sangat bermanfaat bagi negara apabila diikuti dengan pendidikan dan kesehatan yang baik sehingga dapat memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Terdapat beberapa alasan jumlah penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan negara yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi diharapkan lebih produktif dalam kinerjanya akibat permintaan barang konsumsi yang semakin tinggi pula, namun pertumbuhan penduduk didominasi oleh penduduk miskin sehingga kualitas sumber daya manusia rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu menyebabkan hambatan dalam pembangunan negara.
- 2) Penduduk pada sebagian besar negara masih bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas yang rendah (tradisional). Sulitnya penduduk berpindah dari sektor pertanian produktivitas rendah ke sektor pertanian produktivitas tinggi atau modern juga memperlambat pembangunan negara.
- 3) Cepatnya pertumbuhan penduduk mempersulit dalam peningkatan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kelahiran membuat permasalahan baru dalam menata maupun mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3.1 Keterkaitan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan

Adanya pertambahan jumlah penduduk berkaitan secara langsung dengan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang pesat namun peningkatan penduduk tersebut tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin menjadi meningkat. Selain itu, tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan beban keluarga dalam segi ekonomi juga meningkat terutama beban biaya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di tinjauan pustaka, terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk dengan kemiskinan. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka kemiskinan baik tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan pula dan sebaliknya. Oleh karena itu, diharapkan peningkatan jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih produktif dan dapat menurunkan kemiskinan.

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS (2021), Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah output yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah dalam proses produksi baik berupa barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. PDRB dapat ditentukan melalui dua pendekatan yaitu berdasarkan lapangan usaha (sisi sektoral) maupun pengeluaran. Selain itu, PDRB juga dapat ditentukan berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku.

1) PDRB berdasarkan harga konstan (riil)

PDRB berdasarkan harga konstan (riil) merupakan nilai tambah seluruh output (barang dan jasa) yang dihasilkan suatu negara berdasarkan harga tahun dasar atau tahun tertentu sebagai acuan yaitu per 10 tahun dan tidak ada pengaruh inflasi di dalamnya. Hal tersebut digunakan sebagai penanda pola pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2) PDRB berdasarkan harga berlaku

PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan nilai tambah seluruh output (barang dan jasa) yang dihasilkan suatu negara menggunakan perhitungan harga berlaku setiap tahunnya. Hal tersebut digunakan sebagai penanda peranan sektor ekonomi yang ada dari tahun ke tahun.

Jumlah PDRB setiap tahun menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Potensi sumber daya alam masing-

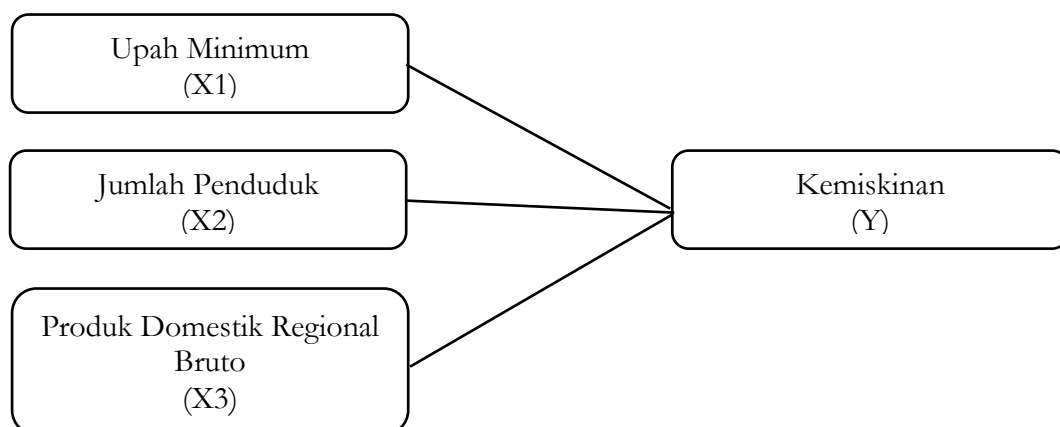
masing daerah dan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut menentukan besar kecilnya jumlah PDRB. Dalam menyediakan faktor-faktor produksi tersebut terkadang terdapat keterbatasan sehingga besar kecilnya PDRB antar daerah bervariasi (Sukirno, 2000).

2.2.4.1 Keterkaitan PDRB dengan Kemiskinan

PDRB yang tinggi menandakan bahwa permintaan akan barang dan jasa mengalami peningkatan. Hal tersebut berarti bahwa kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari meningkat. Oleh karena itu, PDRB secara tidak langsung mempengaruhi kemiskinan melalui daya beli masyarakat yang tinggi. Semakin tinggi proses produksi barang dan jasa maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga dapat memberi pendapatan kepada orang miskin dan mengurangi kemiskinan karena kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

PDRB diharapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sehingga apabila PDRB kabupaten/kota mengalami kenaikan maka kemiskinan baik tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat bertambah karena pendapatan yang bertambah. Bertambahnya pendapatan masyarakat menunjukkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat diatasi melalui meratanya distribusi pendapatan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Formulasi Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan formulasi hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Diduga variabel upah minimum secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila upah minimum mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun dan sebaliknya.
2. Diduga variabel jumlah penduduk secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun dan sebaliknya.
3. Diduga variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila PDRB mengalami kenaikan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun dan sebaliknya.
4. Diduga variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.5 Hipotesis Operasional

2.5.1 Uji Parsial

1. Upah Minimum

$H_0 : \beta_1 \geq 0$ (Tidak terdapat pengaruh negatif signifikan upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

$H_a : \beta_1 < 0$ (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

2. Jumlah Penduduk

$H_0 : \beta_2 \leq 0$ (Tidak terdapat pengaruh positif signifikan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

$H_a : \beta_2 > 0$ (Terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

3. PDRB

$H_0 : \beta_3 \geq 0$ (Tidak terdapat pengaruh negatif signifikan PDRB terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

$H_a : \beta_3 < 0$ (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan PDRB terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

2.5.2 Uji Simultan

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh signifikan upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (Terdapat pengaruh signifikan upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS). Data sekunder tersebut berupa data panel yang merupakan gabungan data time series dari tahun 2011-2020 dan data cross section dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB sebagai variabel bebas (independen) terhadap kemiskinan sebagai variabel terikat (dependen) di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020, baik secara parsial maupun simultan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel terikat (dependen) yaitu kemiskinan dan variabel bebas (independen) yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB.

3.2.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) dan biasanya hanya ada satu variabel. Pada penelitian ini menggunakan kemiskinan sebagai variabel terikat atau dependen. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum seperti kebutuhan-kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020 dalam satuan jiwa.

3.2.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen) dan terdiri dari beberapa variabel. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel sebagai variabel bebas (independen) yaitu upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB.

1. Upah minimum

Upah minimum merupakan standar minimum upah atau imbalan atas hasil kerja seseorang dan biasanya dalam bentuk uang. Data upah minimum yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020 dalam satuan rupiah.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan kumpulan orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020 dalam satuan jiwa.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah output yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah dalam proses produksi baik berupa barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020 dalam satuan juta rupiah.

3.3 Metode Analisis

Dalam melakukan penelitian, dilakukan olah data menggunakan data kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel untuk menentukan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan data cross section, diperoleh data yang lebih banyak dibandingkan hanya menggunakan data time series saja. Hal itu membuat lebih besarnya degree of freedom yang didapatkan. Persamaan regresi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMKit + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 PDRBit + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

PM = penduduk miskin (jiwa)

UMK = upah minimum kabupaten (rupiah)

JP = jumlah penduduk (jiwa)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto riil (juta rupiah)

β_0 = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi

ϵ = variabel di luar model

i = entitas ke-i
t = periode ke-t

3.4 Pendekatan Model Regresi Data Panel

3.4.1 *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model (CEM) yang diestimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan gabungan data *time series* dan *data cross section* tanpa melibatkan adanya perbedaan antar kurun waktu maupun antar individu. Oleh karena itu, dalam pendekatan model *common effect* data antar individu dianggap sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan menggunakan model *common effect*, persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

i = banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
t = banyaknya waktu (1, 2, ..., t)
n x t = banyaknya data panel
 ϵ = residual

3.4.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model (FEM) yang diestimasi menggunakan metode *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) merupakan pendekatan data panel yang melibatkan adanya perbedaan, yaitu perbedaan intersep dengan menambahkan satu variabel seperti variabel dummy. Dalam berbagai kurun waktu, obyek penelitian mempunyai nilai slope yang tetap. Dalam pendekatan model *fixed effect*, terdapat dua asumsi yaitu:

1. Slope konstan dan intersep bervariasi (antar individu dan antar kurun waktu)
2. Slope konstan dan intersep bervariasi (antar individu)

Persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

i = banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
t = banyaknya waktu (1, 2, ..., t)
n x t = banyaknya data panel
 ϵ = residual

3.4.3 *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) yang diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS)* merupakan pendekatan data panel yang melibatkan adanya perbedaan, yaitu perbedaan antar individu dan antar kurun waktu secara acak (*random*). Perbedaan tersebut menyebabkan residual dimana residual ini menyebabkan perbedaan intersep. Oleh karena itu, model *random effect* juga disebut *Error Component Model (ECM)*. Dalam pendekatan model *random effect*, terdapat dua asumsi yaitu:

1. Slope konstan dan intersep bervariasi (antar individu dan antar kurun waktu)
2. Slope konstan dan intersep bervariasi (antar individu)

Persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

i = banyaknya observasi (1, 2, ..., n)

t = banyaknya waktu (1, 2, ..., t)

$n \times t$ = banyaknya data panel

ϵ = residual

3.5 Pemilihan Model

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga uji yang dapat dilakukan untuk memilih model yang tepat yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih model yang tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Untuk menentukan Uji Chow, dapat dilihat nilai *Sum of Squares (RSS)* dari kedua model tersebut. Menurut Widarjono (2018), hipotesis dalam Uji Chow yaitu sebagai berikut:

H_0 : model *common effect*

H_a : model *fixed effect*

Rumus dalam menentukan Uji Chow menggunakan F statistik yaitu sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{RSS_1 - RSS_2}{k} \cdot \frac{n - k}{RSS_2}$$

Keterangan :

RSS_1 = *residual of squares* dari model *common effect*

RSS_2 = *residual of squares* dari model *fixed effect*

i = jumlah individu

t = jumlah periode/kurun waktu

k = jumlah parameter dalam model *fixed effect*

Selain menentukan nilai F statistik, juga harus ditentukan nilai F tabel dengan cara mencari df (*degree of freedom*) yaitu dari m untuk numerator dan n-k untuk denominator. Untuk memilih model yang tepat antara model *common effect* dan model *fixed effect* dapat melalui dua cara, baik membandingkan antara F statistik dengan F tabel maupun membandingkan antara nilai probabilitas dengan alpha (α).

Apabila nilai F statistik lebih besar dari nilai F tabel atau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih yaitu model *fixed effect*. Sedangkan, apabila nilai F statistik lebih kecil dari nilai F tabel atau nilai probabilitas lebih besar dari alpha (α) maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih yaitu model *common effect*.

3.5.2 Uji LM

Uji LM merupakan uji yang digunakan untuk memilih model yang tepat antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Menurut Widarjono (2018), hipotesis dalam Uji LM yaitu sebagai berikut:

H_0 : model *common effect*

H_a : model *random effect*

Rumus dalam menentukan Uji LM yaitu sebagai berikut:

$$LM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2$$

$$LM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2$$

Keterangan :

t = jumlah periode/kurun waktu

ϵ = residual dari model *common effect*

Selain menentukan nilai LM hitung, juga harus ditentukan nilai X^2 tabel dengan cara mencari df (*degree of freedom*) dari jumlah variabel independen. Untuk memilih model yang tepat antara model *common effect* dan model *random effect* yaitu dengan membandingkan antara LM hitung dengan X^2 tabel. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai X^2 tabel maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih yaitu model *random effect*. Sedangkan, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai X^2 tabel maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih yaitu model *common effect*.

3.5.3 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk memilih model yang tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Menurut Widarjono (2018), hipotesis dalam Uji Hausman yaitu sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*

H_a : model *fixed effect*

Rumus dalam menentukan Uji Hausman dengan kriteria Wald yaitu sebagai berikut:

$$W = X^2[K] = [GLS]'[-GLS]$$

Selain menentukan nilai W hitung, juga harus ditentukan nilai kritis chi-squares dengan cara mencari df (*degree of freedom*) dari jumlah variabel independen. Untuk memilih model yang tepat antara model *fixed effect* dan model *random effect* dapat melalui dua cara, baik membandingkan antara W hitung dengan nilai kritis chi-squares maupun membandingkan antara nilai probabilitas dengan α (α).

Apabila nilai W hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares atau nilai probabilitas lebih kecil dari α maka H_0 ditolak sehingga model yang dipilih yaitu model *random effect*. Sedangkan, apabila nilai W hitung lebih kecil dari nilai kritis chi-squares atau nilai probabilitas lebih besar dari α maka H_0 diterima sehingga model yang dipilih yaitu model *fixed effect*.

3.6 Uji Statistik

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa uji statistik yang dilakukan berupa uji secara parsial (uji t), uji secara simultan atau bersama-sama (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut:

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Untuk dapat menentukan bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan suatu uji yaitu uji t atau uji variabel secara parsial. Saat salah satu variabel independen di uji menggunakan uji t , maka variabel independen yang lainnya dianggap tetap. Hipotesis dalam uji t yaitu sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 \leq 0$ (Tidak terdapat pengaruh positif signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial)

H_a : $\beta_1 > 0$ (Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial)

H_0 : $\beta_1 \geq 0$ (Tidak terdapat pengaruh negatif signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial)

H_a : $\beta_1 < 0$ (Terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial)

Uji t dilakukan dengan mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t =$$

Selain menentukan nilai t hitung, juga harus ditentukan nilai t kritis dengan cara melihat nilai df (degree of freedom) yaitu $n-k$ pada tabel t dan alpha (0,05). Untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada uji t atau uji parsial ini dapat melalui dua cara, baik membandingkan antara t hitung dengan t kritis maupun membandingkan antara nilai probabilitas dengan alpha (α).

Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t kritis atau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) maka H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh (positif atau negatif) dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Sedangkan, apabila nilai t hitung lebih kecil dari nilai t kritis atau nilai probabilitas lebih besar dari alpha (α) maka H_0 diterima sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Untuk dapat menentukan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dilakukan suatu uji yaitu uji F atau uji variabel secara simultan. Hipotesis dalam uji F yaitu sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan)

H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan)

Uji F atau uji simultan dilakukan dengan mencari nilai F hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$F =$$

Selain menentukan nilai F hitung, juga harus ditentukan nilai F kritis dengan cara melihat nilai df (degree of freedom) yaitu $k-1$ untuk numerator dan $n-k$ untuk denominator pada tabel F serta alpha (0,05). Untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara bersama-sama pada uji F atau uji simultan ini dapat melalui dua cara, baik membandingkan antara F hitung dengan F kritis maupun membandingkan antara nilai probabilitas dengan alpha (α).

Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis atau nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (α) maka H_0 ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Sedangkan, apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis atau nilai probabilitas lebih besar dari alpha (α) maka H_0 diterima sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan sebagai ukuran seberapa baik analisis dalam suatu model penelitian. Di dalam model penelitian, besarnya R^2 digunakan dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisis. Oleh karena itu, sisa besarnya R^2 tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang berada di luar model penelitian. Besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat diperoleh dari rumus berikut:

$$R^2 =$$

$$R^2 = 1 -$$

$$R^2 = 1 - ({}^2)/()$$

$$R^2 = 1 - ({}^2)/()^2$$

Variabel lain yang ditambahkan pada model penelitian sebagai variabel independen dapat membuat nilai R^2 menjadi lebih besar. Hal tersebut menyebabkan nilai R^2 menjadi nilai R^2 yang disesuaikan. Besarnya R^2 yang disesuaikan dapat diperoleh dari rumus berikut:

$$^2 = 1 -$$

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB sebagai variabel independen terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel berupa gabungan data time series dan cross section yaitu periode 2011-2020 dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 50. Dalam analisis regresi data panel dimulai dengan memilih satu model yang tepat, dimana model tersebut nantinya akan digunakan untuk hasil analisis penelitian. Pemilihan model tersebut berasal dari tiga model yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Ketiga model tersebut akan diuji menggunakan Uji Chow, Uji LM, dan Uji Hausman. Penelitian ini menggunakan suatu alat analisis berupa Eviews 9.

4.1 Deskriptif Data

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Kabupaten/ Kota	Statistik Deskriptif	PM (jiwa)	UMK (rupiah)	JP (jiwa)	PDRB (juta rupiah)
Kabupaten Kulonprogo	Mean	84.340	1.244.608	414.630,9	6.721.706
	Maximum	92.800	1.750.500	436.395	8.770.750
	Minimum	74.620	892.660	394.200	5.246.147
Kabupaten Bantul	Mean	147.550	1.278.301	972.446,1	16.044.321
	Maximum	160.150	1.790.500	1.018.402	19.154.769
	Minimum	131.150	892.660	922.104	12.728.666
Kabupaten Gunungkidul	Mean	142.070	1.213.273	717.879,4	11.492.454
	Maximum	157.100	1.705.000	747.161	13.605.075
	Minimum	123.080	892.660	685.003	9.248.011
Kabupaten Sleman	Mean	104.200	1.304.644	1.163.499	28.982.081
	Maximum	117.300	1.846.000	1.219.640	35.289.808
	Minimum	90.170	892.660	1.116.184	22.645.852
Kota Yogyakarta	Mean	33.760	1.391.252	408.665,2	23.046.821
	Maximum	37.700	2.004.000	431.939	27.685.286
	Minimum	29.450	892.660	373.589	18.206.090
Provinsi	Mean	511.890	1.195.927	3.698.478	86.256.752

DIY	Maximum	564.300	1.704.608	3.882.288	104.487.544
	Minimum	448.470	892.660	3.509.997	68.049.874

Sumber : hasil olah Excel, 2022

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada Kabupaten Kulonprogo yaitu sejumlah 92.800 jiwa pada tahun 2011. Kemiskinan yang masih tinggi tersebut disebabkan oleh masih banyaknya tempat tinggal penduduk yang kurang bahkan tidak layak, akses pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, sandang yang tidak layak, pendapatan masyarakat yang sangat rendah, bahkan daya beli masyarakat terutama konsumsi masih sangat rendah. Jumlah penduduk miskin terendah pada Kabupaten Kulonprogo yaitu sejumlah 74.620 jiwa pada tahun 2019. Pengurangan kemiskinan pada Kabupaten Kulonprogo dianggap cukup berhasil salah satunya karena pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Pembangunan bandara tersebut memberi ganti rugi tanah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membangun tempat tinggal yang lebih layak serta berjualan di sekitar bandara sehingga pendapatan meningkat. Selain itu, dari tahun ke tahun wisata di Kabupaten Kulonprogo semakin menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama pendapatan yang meningkat sehingga kemiskinan dapat berkurang. UMK Kulonprogo juga meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.750.500 di atas UMP DIY.

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada Kabupaten Bantul yaitu sejumlah 160.150 jiwa pada tahun 2015. Kemiskinan yang masih tinggi tersebut disebabkan oleh gempa bumi yang menelan banyak korban jiwa, rumah-rumah dengan kerusakan parah bahkan rusak total, serta kerugian harta benda seperti usaha kerajinan keramik yang hancur di Kasongan. Selain itu, pada tahun 2015 masih banyak orang yang menganggur padahal sudah dalam usia kerja sehingga kemiskinan sangat tinggi. Untuk jumlah penduduk miskin terendah pada Kabupaten Bantul yaitu sejumlah 131.150 jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya pembangunan infrastruktur seperti jalan sehingga mempermudah akses. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang sehingga menambah pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. UMK Bantul juga meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.790.500 di atas UMP DIY.

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada Kabupaten Gunungkidul yaitu sejumlah 157.100 jiwa pada tahun 2011. Kemiskinan yang masih tinggi tersebut disebabkan oleh masih banyaknya tempat tinggal penduduk yang kurang bahkan tidak layak, minat pendidikan yang rendah, akses kesehatan yang masih rendah, sandang yang tidak layak,

pendapatan masyarakat yang sangat rendah, bahkan daya beli masyarakat terutama konsumsi masih sangat rendah. Oleh karena itu, jumlah bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul juga tinggi karena masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang merantau baik untuk pekerjaan maupun pendidikan. Untuk jumlah penduduk miskin terendah pada Kabupaten Gunungkidul yaitu sejumlah 123.080 jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya sektor pariwisata terutama pantai sehingga menambah pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul meningkat menjadi 127.610 jiwa karena pandemi Covid-19 membuat banyak orang merantau yang di-PHK sehingga pulang ke kampung halaman. UMK Gunungkidul pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.705.000 setara dengan UMP DIY. Upah minimum Kabupaten Gunungkidul merupakan yang paling rendah dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY.

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 117.300 jiwa pada tahun 2011. Kemiskinan yang masih tinggi tersebut disebabkan oleh dampak letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 sehingga mengalami kerugian harta benda seperti perkebunan salak pondok dengan total kerugian mencapai 200 miliar. Untuk jumlah penduduk miskin terendah pada Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 90.170 jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuat ladang usaha bagi masyarakat berupa usaha kos-kosan maupun warung di sekitar kampus. Selain itu, munculnya pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket juga menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman meningkat menjadi 99.780 jiwa karena pandemi Covid-19 menyebabkan perkuliahan menjadi daring sehingga banyak usaha kos-kosan dan warung menjadi bangkrut. UMK Sleman pada tahun 2020 sebesar Rp 1.846.000 di atas UMP DIY.

Jumlah penduduk miskin tertinggi pada Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 37.700 jiwa pada tahun 2011. Kemiskinan yang masih tinggi tersebut disebabkan oleh rendahnya akses kesehatan, minat sekolah masih rendah dan banyaknya usia kerja yang tidak bekerja. Untuk jumlah penduduk miskin terendah pada Kota Yogyakarta yaitu sejumlah 29.450 jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuat ladang usaha bagi masyarakat berupa usaha kos-kosan maupun warung di sekitar kampus. Selain itu, sektor pariwisata di Kota Yogyakarta juga berkembang karena merupakan pusat kota sehingga Kota Yogyakarta menjadi pusat perekonomian dan pendidikan. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan menurun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta meningkat menjadi 31.620 jiwa karena pandemi

Covid-19 menyebabkan perkuliahan menjadi daring sehingga banyak usaha kos-kosan dan warung menjadi bangkrut. Selain itu, adanya PSBB membuat wisata sepi pengunjung sehingga pendapatan masyarakat turun. UMK Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 2.004.000 di atas UMP DIY. Upah minimum Kota Yogyakarta merupakan yang paling tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY.

Rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu pada Kabupaten Bantul sebesar 147.553 jiwa, sedangkan terendah pada Kota Yogyakarta sebesar 33.756 jiwa. Rata-rata upah minimum tertinggi yaitu pada Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.391.252, sedangkan terendah pada Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 1.213.273. Rata-rata jumlah penduduk tertinggi yaitu pada Kabupaten Sleman sebesar 1.163.499 jiwa, sedangkan terendah pada Kota Yogyakarta sebesar 408.665 jiwa. Rata-rata PDRB tertinggi yaitu pada Kabupaten Sleman sebesar Rp 28.982.081.000.000, sedangkan terendah pada Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 6.721.706.000.000.

Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Bantul karena terdapat kecamatan yang paling miskin yaitu kecamatan Sedayu. Sebagian besar masyarakat pada kecamatan tersebut bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan pertanian dengan kata lain hanya mengerjakan lahan orang lain. Upah minimum terendah berada pada Kabupaten Gunungkidul karena biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY. Rata-rata upah minimum kabupaten/kota di atas upah minimum Provinsi DIY karena kebijakan penetapan UMK didasarkan pada UMP.

4.2 Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Hasil Regresi Data Panel

Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel dengan CEM, FEM, dan REM

Variabel	CEM		FEM		REM	
Independen	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	66157,00	0,0000*	265065,8	0,0000*	183741,2	0,0000*
UMK	0,002562	0,7351	-0,018954	0,0004*	-0,019966	0,0001*
JP	0,147532	0,0000*	-0,205885	0,0000*	-0,076879	0,0078*
PDRB	-0,004379	0,0000*	0,000760	0,2225	0,0000504	0,9315
R ²	0,885055		0,991223		0,658339	
Adjusted R ²	0,877558		0,989760		0,636057	
Prob (F-statistic)	0,000000		0,000000		0,000000	

Catatan : * = signifikan pada alpha 5%

4.2.2 Pemilihan model yang tepat

4.2.2.1 Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih model yang tepat antara model *common effect* dengan model *fixed effect*. Menurut Widarjono (2018), hipotesis dalam Uji Chow yaitu sebagai berikut:

H_0 : model *common effect*

H_a : model *fixed effect*

Dalam Uji Chow, untuk memilih model yang tepat dapat dianalisis menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) yang dibandingkan dengan alpha (α). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha maka menolak H_0 yang berarti model *fixed effect* yang terpilih, sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha maka gagal menolak H_0 yang berarti model *common effect* yang terpilih.

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Eviews 9

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	127.008578	(4,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	128.615552	4	0.0000

Sumber : hasil olah data Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa model yang tepat dan terpilih dalam Uji Chow yaitu model *fixed effect*.

4.2.2.2 Uji Hausman

Dalam Uji Chow, diperoleh model yang tepat yaitu model *fixed effect* sehingga diperlukan Uji Hausman untuk memilih model yang tepat antara model *fixed effect* dengan model *random effect*. Menurut Widarjono (2018), hipotesis dalam Uji Hausman yaitu sebagai berikut:

H_0 : model *random effect*

H_a : model *fixed effect*

Dalam Uji Hausman, untuk memilih model yang tepat dapat dianalisis menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) yang dibandingkan dengan alpha (α). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha maka menolak H_0 yang berarti model *fixed effect* yang terpilih, sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha maka gagal menolak H_0 yang berarti model *random effect* yang terpilih.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Eviews 9

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	35.590338	3	0.0000

Sumber : hasil olah data Eviews 9, 2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa model yang tepat dan terpilih dalam Uji Hausman yaitu model *fixed effect*.

4.2.3 Uji Statistik Model *Fixed Effect*

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, model yang tepat dalam penelitian ini yaitu menggunakan model *fixed effect*. Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$PMit = 265065,8 - 0,018954 UMKit - 0,205885 JPit + 0,000760 PDRBit + \epsilon it$$

4.2.3.1 Hasil Regresi Model *Fixed Effect*

Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Variabel independen	Koefisien	Probabilitas
C	265065,8	0,0000*
UMK	-0,018954	0,0004*
JP	-0,205885	0,0000*
PDRB	0,000760	0,2225

R2	0,991223
Adjusted R2	0,989760
Prob (F-statistic)	0,000000

Catatan : * = signifikan pada alpha 5%

4.2.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini, dilakukan uji parsial atau uji t pada masing-masing variabel independen dimana alpha atau tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji parsial atau uji t pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upah Minimum

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,018954 dan probabilitas sebesar 0,0004 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jumlah Penduduk

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,205885 dan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. PDRB

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,000760 dan probabilitas sebesar 0,2225 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga gagal menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Pada penelitian ini, dilakukan uji simultan atau uji F secara bersama-sama pada variabel independen dimana alpha atau tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Diperoleh nilai R^2 sebesar 0,991223 yang berarti bahwa 99,12% variabel kemiskinan dijelaskan oleh variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB sementara sisanya yaitu 0,88% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.4 Pembahasan

4.2.4.1 Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Pada penelitian ini, uji parsial atau uji t variabel upah minimum menggunakan regresi model fixed effect menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,018954. Apabila upah minimum naik sebesar 1 rupiah maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,018954 jiwa dan sebaliknya apabila upah minimum turun sebesar 1 rupiah maka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,018954 jiwa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi upah yang diperoleh maka mampu menurunkan kemiskinan yang ada. Ketika upah yang ditetapkan tinggi, pendapatan masyarakat bertambah sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan keluar dari kondisi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tertulis pada tinjauan pustaka yaitu penelitian terdahulu oleh Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si. dkk, Quinn dan Cahill, Kurniawati dkk, serta Riva dkk.

4.2.4.2 Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Pada penelitian ini, uji parsial atau uji t variabel jumlah penduduk menggunakan regresi model fixed effect menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,205885. Apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 jiwa maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,205885 jiwa dan sebaliknya apabila jumlah penduduk turun sebesar 1 jiwa maka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,205885 jiwa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputra, Zuharmin, Damanik dan Sidauruk. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berisi teori dimana jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, semakin tinggi jumlah penduduk maka menyebabkan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin karena bertambahnya beban ekonomi keluarga dan meningkatkan pengangguran karena banyak tenaga kerja yang tidak terserap.

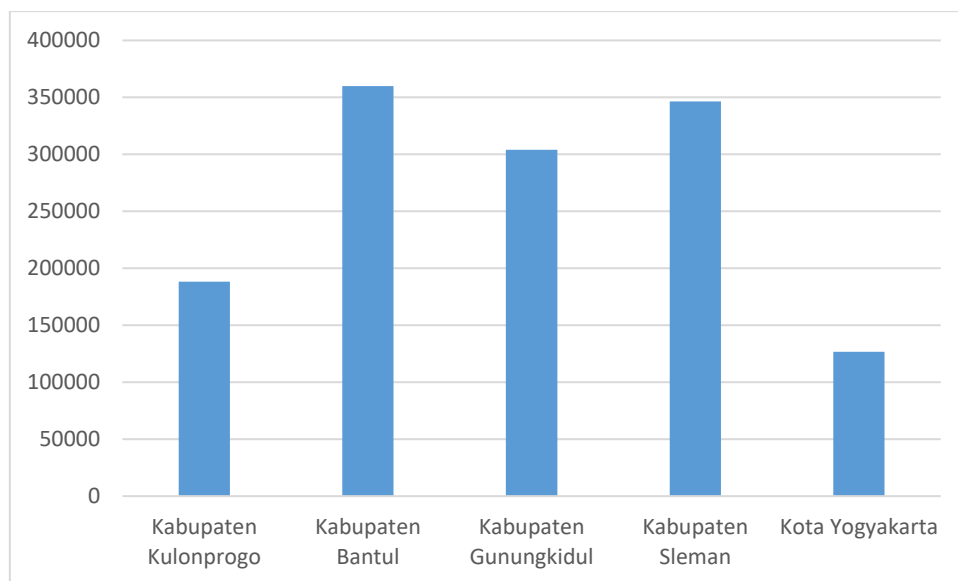
Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah penduduk dapat menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi DIY lebih produktif. Perbaikan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DIY yang semakin naik dari tahun ke tahun. Peningkatan SDM berasal dari sektor pendidikan seperti subsidi Kartu Indonesia Pintar (KIP), kesehatan seperti subsidi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS, keterampilan seperti Prakerja, dan ekonomi seperti bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyak masyarakat yang membuka usaha ataupun bisnis untuk mendapat penghasilan sehingga lebih produktif. Dengan tingginya jumlah penduduk maka permintaan akan barang dan jasa juga meningkat sehingga lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu, masyarakat memperoleh pendapatan dan kemiskinan turun.

4.2.4.3 PDRB terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Pada penelitian ini, uji parsial atau uji t variabel menggunakan regresi model fixed effect menunjukkan bahwa PDRB tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputra, Suliswanto, Wiguna, Damanik dan Sidauruk. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berisi teori dimana PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi PDRB maka jumlah penduduk miskin semakin menurun.

Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa bertambahnya PDRB tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Peningkatan PDRB tidak dapat dijadikan ukuran kesejahteraan penduduk karena PDRB hanya menghitung seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah tanpa memperhitungkan yang menghasilkan nilai tambah tersebut penduduk daerah tersebut atau bukan. Oleh karena itu, PDRB yang besar tersebut tidak dapat menurunkan kemiskinan masyarakat bahkan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. PDRB perkapita dapat diperoleh melalui perhitungan total PDRB yang dibagi dengan total jumlah penduduk sehingga seringkali menyebabkan ketimpangan pendapatan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti upah minimum, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.

4.2.4 Analisis Kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY



Gambar 4.1 Intercept Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Dari grafik di atas, jumlah penduduk miskin terendah pada Kota Yogyakarta, sedangkan tertinggi pada Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuat ladang usaha bagi masyarakat berupa usaha kos-kosan maupun warung di sekitar kampus. Selain itu, sektor pariwisata di Kota Yogyakarta juga berkembang karena merupakan pusat kota sehingga Kota Yogyakarta menjadi pusat perekonomian dan pendidikan. Upah minimum Kota Yogyakarta merupakan yang paling tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Bantul karena terdapat kecamatan yang paling miskin yaitu kecamatan Sedayu. Sebagian besar masyarakat pada kecamatan tersebut bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan pertanian dengan kata lain hanya mengerjakan lahan orang lain.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Upah minimum secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, apabila upah minimum naik maka kemiskinan mengalami penurunan dan sebaliknya apabila upah minimum turun maka kemiskinan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, besarnya upah sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari kondisi kemiskinan.
2. Jumlah penduduk secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, apabila jumlah penduduk naik maka kemiskinan mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi DIY lebih produktif. Peningkatan SDM berasal dari sektor pendidikan seperti subsidi KIP, kesehatan seperti subsidi KIS dan BPJS, keterampilan seperti Prakerja, dan ekonomi seperti bansos dan BLT. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyak masyarakat yang membuka usaha untuk mendapat penghasilan sehingga lebih produktif. Dengan tingginya jumlah penduduk maka permintaan akan barang dan jasa juga meningkat sehingga lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan mengurangi kemiskinan.
3. PDRB secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan PDRB tidak dapat dijadikan ukuran kesejahteraan penduduk karena PDRB hanya menghitung seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah tanpa memperhitungkan yang menghasilkan nilai tambah tersebut penduduk daerah tersebut atau bukan.
4. Variabel upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Implikasi

1. Kebijakan penetapan upah minimum sebaiknya meningkat setiap tahun sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga mampu menambah pendapatan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya agar kesejahteraan dan kehidupan yang layak dapat dicapai.

2. Peningkatan jumlah penduduk sebaiknya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus menerus sehingga lebih produktif dan dapat menurunkan kemiskinan. Perbaikan kualitas SDM dapat dilakukan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat seperti pemberian subsidi pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelatihan keterampilan (*soft skill*).
3. Peningkatan PDRB tidak akan berarti apabila tidak mampu mengurangi kemiskinan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata bahkan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan sektor pertanian, industri, dan perdagangan serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal agar dapat mengatasi kesenjangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS. 2021a. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I. Yogyakarta." Retrieved (<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>).
- BPS. 2021b. "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota." Retrieved (<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>).
- BPS. 2021c. "PDRB." Retrieved (<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjeViewTab3>).
- BPS. 2021d. "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota." Retrieved (<https://www.bps.go.id/indicator/23/621/2/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html>).
- BPS. 2021e. "Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahunan." Retrieved (<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/52/268/6/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-tahunan.html>).
- BPS. 2021f. "Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi Di DI Yogyakarta." Retrieved (<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/272/1/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta>).
- Damanik, R. K., and S. A. Sidauruk. 2020. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Darma Agung* 28(3):358. doi: 10.46930/ojsuda.v28i3.800.
- Feriyanto, N., D. El Aiyubbi, and A. Nurdany. 2020. "The Impact of Unemployment, Minimum Wage, and Real Gross Regional Domestic Product on Poverty Reduction in Provinces of Indonesia." *Asian Economic and Financial Review* 10(10):1088–99. doi: 10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomika Pembangunan:Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, Dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawati, A., B. T. Gunawan, and D. P. R. Indrasari. 2017. "Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2006-2014." *Journal of Research in Economics and Management* 17(2):233. doi: 10.17970/jrem.17.170207.id.
- Leasiwal, T. C. 2013. "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi* VII(2):1–26.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1)
- Quinn, J. F., and K. E. Cahill. 2017. "Efektifitas Relatif Dari Upah Minimum Dan Kredit Pajak Penghasilan Yang Diperoleh Sebagai Anti-Alat Kemiskinan." Retrieved (<https://doi.org/10.3390/rel8040069>).
- Riva, V. A., H. Kadir, and D. Setiawan. 2014. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau." *JOM FEKON* 1(2):2013–15.
- Rusdarti, and L. K. Sebayang. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Economia* 9(1):85. doi: 10.19184/ejeba.v6i1.11108.
- Said, R. 2001. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- Saputra, W. A. 2011. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah." 1–77.
- Sukirno, S. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2005. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8:354–66.
- Supriatna, T., and 2000. n.d. *Birokrasi, Pemberdayaan, Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora.
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
- Widarjono, A. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiguna, V. I. 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010*.
- Zuharmin. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Sulawesi Tahun 2006-2015." *Jurnal Publikasi* 105–12.

LAMPIRAN

Lampiran A Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2011	92.800	159.400	157.100	117.300	37.700
2012	92.400	158.800	156.500	116.800	37.600
2013	86.500	156.600	152.400	110.800	35.600
2014	84.700	153.500	148.400	110.800	35.600
2015	88.130	160.150	155.000	110.960	35.980
2016	84.340	142.760	139.150	96.630	32.060
2017	84.170	139.670	135.740	96.750	32.200
2018	77.720	134.840	125.760	92.040	29.750
2019	74.620	131.150	123.080	90.170	29.450
2020	78.060	138.660	127.610	99.780	31.620

Lampiran B Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2011	892.660	892.660	892.660	892.660	892.660
2012	892.660	892.660	892.660	892.660	892.660
2013	954.339	993.484	947.114	1.026.181	1.065.247
2014	1.069.000	1.125.500	988.500	1.127.000	1.173.300
2015	1.138.000	1.163.800	1.108.249	1.200.000	1.302.500
2016	1.268.870	1.297.700	1.235.700	1.338.000	1.452.400
2017	1.373.600	1.404.760	1.337.650	1.448.385	1.572.200
2018	1.493.250	1.572.150	1.454.200	1.574.550	1.709.150
2019	1.613.200	1.649.800	1.571.000	1.701.000	1.848.400
2020	1.750.500	1.790.500	1.705.000	1.846.000	2.004.000

Lampiran C Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2011	394.200	922.104	685.003	1.116.184	392.506
2012	398.672	934.674	692.579	1.128.943	397.594
2013	403.179	947.072	700.191	1.141.733	402.679
2014	407.709	959.445	707.794	1.154.501	407.667
2015	412.198	971.511	715.282	1.167.481	412.704
2016	416.683	983.527	722.479	1.180.479	417.744
2017	421.295	995.264	729.364	1.193.512	422.732
2018	425.758	1.006.692	736.210	1.206.714	427.498
2019	430.220	1.018.402	742.731	1.219.640	431.939
2020	436.395	985.770	747.161	1.125.804	373.589

Lampiran D PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2011-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2011	5.246.146,78	12.728.666,29	9.248.010,91	22.645.851,90	18.206.089,70
2012	5.475.148,20	13.407.021,78	9.695.979,84	23.957.112,80	19.189.074,80
2013	5.741.660,29	14.138.719,30	10.177.432,51	25.367.414,20	20.239.557,70
2014	6.004.316,44	14.851.124,13	10.639.792,32	26.713.071,20	21.307.763,60
2015	6.281.795,76	15.588.520,43	11.152.363,12	28.098.006,90	22.393.012,20
2016	6.580.676,97	16.375.513,15	11.696.155,83	29.563.375,20	23.536.288,10
2017	6.973.405,56	17.209.871,50	12.281.557,86	31.140.590,60	24.768.426,10
2018	7.728.409,13	18.150.877,01	12.914.940,78	33.139.204,90	26.127.217,13
2019	8.770.750,46	19.154.769,07	13.605.074,83	35.289.808,40	27.685.286,45
2020	8.414.754,11	18.838.125,30	13.513.234,92	33.906.373,82	27.015.491,16

Lampiran E Penduduk Miskin, Upah Minimum, Jumlah Penduduk, PDRB Provinsi
DIY Tahun 2011-2020

Tahun	PM (jiwa)	UM (rupiah)	JP (jiwa)	PDRB (juta rupiah)
2011	564.300	892.660	3.509.997	68.049.874,40
2012	562.100	892.660	3.552.462	71.702.449,20
2013	541.900	947.114	3.594.854	75.627.449,60
2014	532.600	988.500	3.637.116	79.536.081,80
2015	550.230	988.500	3.679.176	83.474.451,50
2016	494.940	1.182.510	3.720.912	87.685.809,60
2017	488.530	1.337.645	3.762.167	92.300.243,90
2018	460.100	1.454.154	3.802.872	98.024.014,30
2019	448.470	1.570.923	3.842.932	104,487.543,80
2020	475.720	1.704.608	3.882.288	101.679.600,20

Lampiran F Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	127.008578	(4,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	128.615552	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/17/22 Time: 06:36

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66157.00	10389.50	6.367680	0.0000
X1	0.002562	0.007527	0.340384	0.7351
X2	0.147532	0.008536	17.28281	0.0000
X3	-0.004379	0.000336	-13.04951	0.0000
R-squared	0.885055	Mean dependent var		102386.0
Adjusted R-squared	0.877558	S.D. dependent var		43016.64
S.E. of regression	15052.25	Akaike info criterion		22.15306
Sum squared resid	1.04E+10	Schwarz criterion		22.30602
Log likelihood	-549.8265	Hannan-Quinn criter.		22.21131
F-statistic	118.0634	Durbin-Watson stat		0.163158
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran G Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	35.590338	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.018954	-0.019966	0.000002	0.5014
X2	-0.205885	-0.076879	0.000510	0.0000
X3	0.000760	0.000050	0.000000	0.0003

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/17/22 Time: 06:43

Sample: 2011 2020

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	265065.8	22940.75	11.55436	0.0000
X1	-0.018954	0.004877	-3.886747	0.0004
X2	-0.205885	0.035675	-5.771106	0.0000
X3	0.000760	0.000614	1.238217	0.2225

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991223	Mean dependent var	102386.0
Adjusted R-squared	0.989760	S.D. dependent var	43016.64
S.E. of regression	4352.967	Akaike info criterion	19.74075
Sum squared resid	7.96E+08	Schwarz criterion	20.04667
Log likelihood	-485.5187	Hannan-Quinn criter.	19.85725
F-statistic	677.5973	Durbin-Watson stat	1.403372
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/17/22 Time: 06:47
 Sample: 2011 2020
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	265065.8	22940.75	11.55436	0.0000
X1	-0.018954	0.004877	-3.886747	0.0004
X2	-0.205885	0.035675	-5.771106	0.0000
X3	0.000760	0.000614	1.238217	0.2225

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.991223	Mean dependent var	102386.0
Adjusted R-squared	0.989760	S.D. dependent var	43016.64
S.E. of regression	4352.967	Akaike info criterion	19.74075
Sum squared resid	7.96E+08	Schwarz criterion	20.04667
Log likelihood	-485.5187	Hannan-Quinn criter.	19.85725
F-statistic	677.5973	Durbin-Watson stat	1.403372
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran I Nilai Intercept Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

No.	Kabupaten/Kota	Intercept
1	Kabupaten Kulonprogo	188.192,2
2	Kabupaten Bantul	359.800,3
3	Kabupaten Gunungkidul	304.136,8
4	Kabupaten Sleman	346.451,6
5	Kota Yogyakarta	126.748